

TRANSFORMASI BIROKRASI BANYUMAS TAHUN 1830-1835

THE TRANSFORMATION OF BANYUMAS BUREAUCRACY IN 1830-1835

Oleh :

Renita Mustika Kumalasari, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, renitamustika.kumalasari@gmail.com

Abstrak

Banyumas merupakan wilayah bawahan kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa seperti Pajang, Demak, dan Mataram. Setelah Mataram terbagi menjadi dua bagian, Banyumas masuk sebagai wilayah Kasunanan Surakarta dan berstatus sebagai wilayah Mancanegara Kilen. Birokrasi di Banyumas menyesuaikan dengan birokrasi Kasunanan Surakarta yang memiliki ciri birokrasi patrimonial. Ketika Perang Diponegoro tengah berkecamuk, wilayah ini menjadi salah satu titik medan perang. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda menganggap wilayah ini perlu berada dibawah pengawasan Belanda secara langsung. Setelah diambil alih pemerintahan Hindia Belanda, Banyumas kemudian diubah menjadi Karesidenan Banyumas dengan birokrasi yang menyesuaikan dengan pemerintahan Hindia Belanda. Birokrasi di Banyumas kemudian mulai diubah menjadi birokrasi tipe rasional, meskipun masih ada percampuran dengan birokrasi patrimonial. Pembentukan Karesidenan Banyumas berdampak pada perubahan birokrasi pemerintahan Banyumas, perkembangan jalur transportasi, dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat di Banyumas.

Kata Kunci: *Banyumas, Karesidenan, Transformasi Birokrasi.*

Abstract

Banyumas is a subordinate territory of big kingdoms in the land of Java such as Pajang, Demak, and Mataram. After Mataram was divided into two areas, Banyumas was to be included in to Surakarta Sunanate area and had the status as a Mancanegra Kilen region. The bureaucracy in Banyumas adjusted to the Surakarta Sunanate bureaucracy, which had the characteristics of a patrimonial bureaucracy. When Diponegoro War was underway, this region became one of the battlegrounds. Therefore the Dutch East Indies government considered this region to be directly under the Dutch supervision. After being taken over by the Dutch East Indies government, Banyumas was changed to be Banyumas Residency. The bureaucracy of the Banyumas Residency also adjusted to that of the Dutch East Indies government. The bureaucracy then began to be transformed into a rational type, although to some extend still mixed with the patrimonial bureaucracy. The establishment of the Banyumas Residency affected the changes of the Banyumas government bureaucracy, the development of transportation routes, and the socioeconomic growth of the Banyumas society.

Keywords : Banyumas, Bureaucratic Transformation, Residency.

PENDAHULUAN

Setelah Perang Diponegoro berhasil dipadamkan, beberapa wilayah kerajaan Yogyakarta dan Surakarta diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda. Banyumas merupakan salah satu wilayah Kasunanan Surakarta yang kemudian diambil alih oleh Pemerintahan Belanda. Wilayah ini diambil karena menjadi salah satu titik medan perang dalam Perang Diponegoro. Pemerintah Belanda menganggap wilayah ini penting untuk ada di bawah pengawasan Pemerintah secara langsung. Keputusan pengambilan wilayah ini menjadi hal yang merugikan bagi Kasunanan Surakarta, yang tidak secara resmi terlibat dalam perang Diponegoro, tetapi harus kehilangan wilayah Mancanegara Kilen yang terkenal dengan Kesuburannya.¹

Di bawah Pemerintahan Hindia Belanda, istilah Banyumas secara administratif memiliki tiga pengertian. *Pertama*, merujuk pada suatu wilayah yang berkedudukan sebagai pusat administratif distrik (Distrik Banyumas) yang terletak di tepi sebelah selatan Sungai Serayu. *Kedua*, untuk menyebut wilayah inti Banyumas yang dikenal dengan Lembah Serayu yang berstatus sebagai *Regentschap* atau kabupaten (Kabupaten Banyumas). *Ketiga*, istilah Banyumas juga dimaksudkan untuk menyebut gabungan wilayah yang lebih luas, yaitu Banyumas dan sekitarnya yang pada zaman kolonial tergabung dalam ikatan wilayah *Administrative Residentie* atau Karesidenan (Karesidenan Banyumas), yang terdiri dari lima kabupaten, yaitu Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, Purwokerto, dan

¹Purnawan Basundoro, "Transportasi dan Ekonomi Di Karesidenan Banyumas Tahun 1830-

1940", *Tesis*, (Yogyakarta : UGM, 1999), hlm. 67.

Banyumas sendiri dengan pusat pemerintahannya di Kota Banyumas.²

Banyumas sebagai kabupaten dan distrik sudah ada bahkan sebelum wilayah Banyumas dimiliki oleh pemerintahan Hindia Belanda. Banyumas sebagai sebuah Karesidenanlah yang baru muncul setelah wilayah ini diambil alih oleh Pemerintahan Hindia Belanda.

Penelitian ini di ambil dengan harapan dapat memberikan pengetahuan lebih mendalam terkait sejarah perkembangan wilayah Banyumas dan transformasi birokrasi yang terjadi pada tahun 1830-1835.

Metode Penelitian

Metode sejarah menurut Gilbert J. Garragan, S.J dalam bukunya "A Guide to Historical Method" merupakan seperangkat asas dan aturan yang sistematis. Aturan tersebut

²Tanto Sukardi, *Tanam Paksa di Banyumas* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 1-2.

didesain untuk membantu pengumpulan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis dan menyajikan sintesis hasil hasil yang dicapainya secara lebih efektif. Sedangkan Ricard F. Clarice, dalam bukunya "Logic" mengartikan metode sejarah sebagai system prosedur yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah.³

Metode dalam studi sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis, sehingga tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian sejarah harus sesuai dengan urutan metode yang ada.⁴ Oleh karena itu digunakan serangkaian metode sejarah yang biasanya digunakan dalam penelitian sejarah, metode tersebut terdiri dari empat tahapan pokok *Pertama*, *Heuristik* yaitu kegiatan pengumpulan informasi mengenai subjek penelitian yang diambil. *Kedua*, kritik sumber yaitu kegiatan penyaringan data-data yang telah diperoleh. *Ketiga*, Interpretasi

³A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta : Ombak, 2012), hlm. 27-28.

⁴ Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2011), hlm. 42-43.

yaitu kegiatan menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta sejarah. *Keempat, Historiografi* yaitu kegiatan merangkai hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Terbentuknya Kadipaten Banyumas

Banyumas merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini berada di 108° 39 '17" - 109° 27 '15" Bujur Timur dan 7° 15 '05" - 7° 37 '10" Lintang Selatan. Batas wilayah Banyumas di sebelah utara berbatasan dengan Tegal dan Kabupaten Pemalang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap, dan sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.⁵

Secara garis besar keadaan geografis Kabupaten Banyumas dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama-

sama menguntungkan dalam perekonomian. *Pertama*, bagian utara berupa dataran tinggi dengan puncak Gunung Slamet yang memiliki struktur dan kontur tanah yang cocok untuk usaha perkebunan, pertanian, kehutanan dan merupakan daerah yang potensial untuk pariwisata. *Kedua*, Bagian selatan terdiri dari daerah datar berawa, sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan perkebunan disamping merupakan daerah berawa yang rawan bencana.

Sejarah Banyumas pra-kolonial dapat ditelusik melalui historiografi tradisional berupa babad. Salah satu babad yang membahas terkait Banyumas adalah babad Pasirluhur. Babad ini mengisahkan tentang hubungan kerajaan Majapahit, Pakuan Parahyangan atau Padjadjaran dan Pasirluhur yang dikisahkan menjadi nenek moyang masyarakat Banyumas.⁶

Babad selanjutnya adalah babad Wirasaba yang mengisahkan asal usul Jaka Katuhu dan Adipati Wirahudaya yang saat itu menjabat sebagai Adipati 1 di Wirasaba. Wirasaba merupakan wilayah kerajaan Majapahit, pada masa pemerintahan Kertabumi Brawijaya V.

⁵Esa Meiana Palupi, "Modernisasi Banyumas 1890-1942 : Kajian Perkembangan Sosial-Ekonomi", *Skripsi*, (Yogyakarta : UNY, 2017), hlm. 29.

⁶Budiono Herusatoto, *Banyumas Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak*, (Yogyakarta : LKIS Yogyakarta, 2008), hlm. 31-35.

Wilayah inilah yang menjadi cikal bakal Kadipaten Banyumas.⁷

Setelah Majapahit mengalami kemunduran, wilayah Wirasaba masuk ke dalam bagian kerajaan Demak. Selama masa pemerintahan kerajaan Demak (1478-1548), Wirasaba tidak masuk dalam pencacatan sejarah manapun. Nama Wirasaba baru muncul kembali pada masa pemerintahan Pajang. Nama Wirasaba kembali muncul dalam teks-teks babad Banyumas.

Dalam babad Banyumas dikisahkan bahwa wilayah wirasaba dibawah kepemimpinan Joko Kaiman kemudian dibagi menjadi empat bagian yaitu, Banjar Petambakan, Merden, Wirasaba dan Kejawar. Adipati Wargahutama II kemudian membangun pusat pemerintahan baru di hutan Mangli, dan diberi nama Banyumas.⁸

Setelah berakhirnya kekuasaan Pajang, Banyumas menjadi wilayah bawahan Mataram dengan pola lingkaran konsentris. Pola Lingkungan konsentris tersebut terdiri dari lima bagian yaitu Kraton, Kuthagara, Negaragung, Mancanegara, dan

Pasisiran. Berdasarkan pembagian wilayah kerajaan Mataram tersebut, Banyumas masuk dalam kategori Mancanegara kilen, dengan status sebagai kabupaten.⁹

B. Terbentuknya Karesidenan Banyumas

Kesuburan wilayah Banyumas sudah dikenal sejak masa prakolonial, bahkan wilayah ini pernah dipilih sebagai wilayah lumbung padi bagi Kerajaan Mataram. Ketertarikan pihak kolonial pada wilayah Banyumas sudah ada sejak masa pemerintahan Gubernur jenderal Daendels, Residen Yogyakarta Matthijs Waterloo mengajukan rencana untuk menguasai wilayah di Jawa Tengah dan Timur. Wilayah Bagelen dan Banyumas secara khusus dianggap istimewa oleh Waterloo karena pintu masuk sebelah barat ke selat yang memisahkan Nusa Kambangan dari Jawa daratan, yakni Kali Bujang, merupakan satu-satunya pelabuhan berair dalam di seluruh pantai selatan Jawa yang cocok untuk kapal-kapal samudra. Selain itu Waterloo juga mengusulkan perebutan kabupaten pantai selatan, yaitu Pacitan.¹⁰

⁷ *Ibid.*, hlm 37-38.

⁸ M. Warwin R. Sudarmo dan Bambang S. Purwoko, *Sejarah Banyumas dari Masa ke Masa*, (Jakarta : Bupati Banyumas, 2009), hlm. 85-87.

⁹ Tanto Sukardi, *op cit.*, hlm. 6.

¹⁰ Peter Carey, *Kuasa Ramalan Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855*, (Jakarta : KPG, 2012), hlm. 192.

Ada beberapa faktor lain yang mendorong pemilihan Banyumas sebagai ibu kota Karesidenan Banyumas. *Pertama*, Banyumas merupakan wilayah yang sudah baik jalannya, sehingga pemerintah Hindia Belanda tidak perlu membangun ibu kota dari nol untuk membangun ibu kota karesidenan baru. *Kedua*, Pada masa kolonial, Banyumas dipandang sebagai wilayah yang bukan saja memiliki kekayaan alam berupa tanah yang subur tetapi juga memiliki kekayaan berupa penduduk yang cukup banyak. Pada salah satu survei yang dilakukan di tahun 1833, menunjukkan jumlah penduduk di wilayah Banyumas sebanyak 403.339 jiwa yang tersebar di lima *Afdeeling* yaitu Banyumas, Purwokerto, Dayeluhur, Purbalingga, dan Banjarnegara. Dari persentase tersebut wilayah dengan jumlah penduduk terkecil berada di Dayeluhur dan wilayah dengan penduduk terbanyak berada di *Afdeeling* Banyumas.¹¹ Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak wilayah Banyumas mampu memberikan sumbangan tenaga untuk keperluan Tanam Paksa.

Banyumas sebagai wilayah mancanegara kilen dilepas ke tangan

¹¹ Arsip koleksi UMP, *Algemeen Verslag der Residentie Banjoemas over 1833 Eerste Afdeeling, Algemeen, Bestuur*, No. B067.

pemerintahan Hindia Belanda pada 22 Juni 1830. Untuk menguasai wilayah Banyumas pihak Belanda membayar uang reparasi sebesar f 90.000 kepada kasunanan Surakarta.¹² wilayah Karesidenan Banyumas kemudian dibentuk dari empat kabupaten, lima *Afdeeling* dan 18 Distrik.

Daerah daerah yang telah lama lepas dari Karesidenan Banyumas pun kembali disatukan, seperti Karangobar (Pekalongan), Tanah Madura (Cirebon), Karangsari (Tegal), dan Nusakambangan yang sejak 1706 sudah jatuh ke tangan Belanda. Penetapan pendirian Karesidenan Banyumas dibuat berdasarkan atas surat keputusan Gubernur Jendral no 1 tahun 1830. Wilayah ini kemudian menjadi sebuah karesidenan secara resmi pada tanggal 18 september 1830.¹³

Pemerintah Hindia Belanda menunjuk De Sturler sebagai residen pertama di Banyumas. Sturler menjabat dari tahun 1830-1835. Jabatan Bupati Banyumas kemudian dipegang oleh Tumenggung Cakranegara II, yang

¹² Yustina Hastrini Nurwanti, dkk., *Sejarah Perkembangan Ekonomi dan Kebudayaan di Banyumas Masa Gandasubrata Tahun 1913-1942*, (Yogyakarta : BPNB Yogyakarta, 2015), hlm. 33.

¹³ *Ibid*, hlm. 36.

menjabat dari tahun 1830-1879.¹⁴ Setelah diambil alih birokrasi pemerintahan Banyumas mengikuti sistim birokrasi yang dibentuk oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Gubernur Jendral, yang didampingi oleh dewan India sebagai dewan penasihat, para direktur yang membantu Gubernur Jendral untuk memimpin departemen-departemen.¹⁵

Birokrasi ditingkat kabupaten terdiri atas Bupati (*Regent*), Dewan Kabupaten, dan BPH. Bupati menjabat sekaligus sebagai Ketua Dewan Kabupaten dan Ketua merangkap anggota BPH.¹⁶ Dewan Kabupaten

¹⁴ Budi Tjahjono, *Arsitektur Tradisional Jawa Banyumasan Pada Pendopo Duplikat Si Panji di Kota Lama Banyumas*, Tesis, (Semarang : UNDIP, 2015), hlm. 42-43.

¹⁵ P.J. Suwarno, *Tatanegara Indonesia dari Sriwijaya sampai Indonesia Modern*, (Yogyakarta : Penerbit Universitas Sanata Darma, 2003), hlm. 56.

¹⁶ Pada jabatan Bupati digunakan simbol-simbol tertentu, antara lain wewenang menggunakan gelar tumenggung dan berhak menggunakan payung (*songsong*) berwarna putih, separoh hijau dengan tiga strip pinggiran berwarna kuningemas.gelar tumenggung dapat naik seiring dengan naiknya jabatan

beranggotakan orang-orang pribumi, orang Belanda dan orang timur asing. BPH Kabupaten beranggotakan dua orang atau lebih, yang dipilih oleh Dewan Kabupaten. BPH menjalankan pemerintahan sehari-hari atas dasar peraturan daerah yang dibuat oleh Dewan Kabupaten untuk mengatur daerah sesuai dengan otonomi yang dimilikinya. Dalam menjalankan tugasnya BPH dipimpin oleh Bupati yang sekaligus menjadi ketua Dewan Kabupaten.¹⁷

Dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda Banyumas masuk ke dalam tingkat birokrasi karesidenan yang dipimpin oleh seorang Residen. Residen Banyumas berkedudukan di Banyumas dan dibantu oleh tiga orang asisten residen. Setiap asisten residen ditempatkan pada wilayah yang berbeda, yaitu Ajibarang (ibukota Kabupaten Purwokerto), Purbalingga, dan

bupati dengan gelar adipati yang berhak menggunakan payung berwarna putih dengan tiga strip pinggiran berwarna kuning emas. Gelar adipati dapat mencapai simbol pengabdian tertinggi seorang bupati, yang ditandai dengan hak untuk menggunakan *songsong jane*, yaitu payung kebesaran yang seluruhnya berwarna kuning ema (Sukardi, 2014,47).

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 65-66.

Banjarnegara. Sedangkan untuk Banyumas, tidak ditempatkan seorang asisten residen, karena pengawasan dari residen dapat dilaksanakan secara langsung. Asisten Residen dibantu oleh seorang Upas dan seorang Sekertaris Pengadilan Negeri. Dalam ketentuan yang diatur oleh pemerintah kolonial Belanda tentang sistem pemerintahan dalam negeri, maka secara administratif ditentukan melalui dua jalur administratif. Pertama, untuk pemong praja Belanda, terdiri dari *Gewest*, *Afdeeling* dan *Onderafdeling*. Kedua, untuk pamong praja pribumi, terdiri dari *Regentschap* (kabupaten), *District* (kawedanan), dan *Onderdistrict* (kecamatan).¹⁸

Dalam melaksanakan tugasnya bupati dibantu oleh seorang patih, yang dalam segala hal dapat mewakili bupati. Disamping sebagai pimpinan HPB, para bupati juga memegang pimpinan harian pada polisi Pangreh Praja (*bestuurspolitie*). Hal ini mengingat di wilayah kabupatennya dia bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban umum. Setiap kabupaten terdiri dari distrik-distrik yang dipimpin oleh seorang wedana. Di bawah distrik terdapat *onderdistrik* yang dipimpin oleh

seorang Asisten Wedana, yang bertanggungjawab kepada Wedana atasannya. Secara hirarkis birokrasi ditingkat distrik dan *onderdistrik* adalah Wedana, Asisten Wedana, Mantri, juru tulis, dan beberapa Jagakarsa.¹⁹

C. Dampak Pembentukan Karesidenan Banyumas

Banyumas pada tahun 1830-1835 mengalami transformasi birokrasi sebagai akibat jatuhnya wilayah ini ke tangan Hindia-Belanda. jika dilihat menggunakan penelitian Max Weber, perubahan Birokrasi di Banyumas menunjukkan adanya transformasi dari birokrasi patrimonial menuju birokrasi rasional, meskipun penerapannya masih mengalami perpaduan antara satu dengan yang lainnya. Perubahan ini dilihat dari segi pejabat yang bekerja dalam birokrasi di Banyumas. Weber menjelaskan terkait ciri-ciri pejabat birokrasi patrimonial yang ditandai dengan pejabatnya diangkat berdasarkan kriteria subjektif karena ada hubungan emosional dengan pejabat yang mengangkat, sedangkan birokrasi rasional diangkat berdasarkan kriteria objektif, yakni syarat-syarat yang sudah ditetapkan terlebih dahulu sebelum

¹⁸ Yustina Hastrini Nurwanti, dkk., *op cit.*, hlm. 36.

¹⁹ Tanto Sukardi, *op cit.*, hlm. 49.

seorang masuk menjadi pegawai pemerintah.²⁰

Selama masa pra kolonial (1571-1816) 12 bupati yang menjabat di Banyumas, mayoritas ditunjuk atas dasar kekerabatan dari bupati sebelumnya. Penurunan kekuasaan Banyumas dari ahli waris Bupati Banyumas yang pertama terjadi dari Wargahutama II sampai dengan Adipati Yudanegara V dengan tiga bupati dari luar Banyumas, karena kegagalan suksesi pemerintahan Banyumas.

Bupati Karesidenan Banyumas yang pertama tidak diambil dari keluarga ahli waris bupati Banyumas pertama. Jabatan tersebut diberikan kepada Cakranegara I, sedangkan Mertadireja yang masih termasuk ahli waris bupati Banyumas pertama ditunjuk sebagai Bupati Ajibarang yang kemudian berpindah ke Purwokerto.²¹

Ketidakpastian penunjukan pengganti Bupati Karesidenan Banyumas menunjukkan perubahan sistim birokrasi Banyumas yang tidak

tidak lagi menggunakan sistim suksesi lokal yang sebelumnya berjalan. Hal tersebut menunjukkan sistim birokrasi patrimonial di Banyumas mulai bercampur dengan jenis birokrasi rasional.

Pasca pembentukan Karesidenan Banyumas, birokrasi Banyumas juga menunjukkan beberapa ciri birokrasi rasional Weber, pertama, fungsi jabatan ditentukan dengan jelas, Fungsi bupati setelah terbentuk sebagai Karesidenan memiliki dua fungsi yaitu sebagai *Volkshoofd* (wakil rakyat) yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan sendiri untuk memerintah rakyat daerahnya disisi lain juga sebagai bawahan Belanda yang harus menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh Belanda melalui peraturan-peraturan yang tertulis dari pemerintahan Hindia Belanda.²² Heather sutherland dalam bukunya *Terbentuknya sebuah elite birokrasi* menjelaskan terkait pemerintahan Mataram yang sebelumnya berjalan di Banyumas. Menurut Heather Sistim tersebut menunjukkan kesederhanaan administrasi dengan skema yang diulang-ulang dari struktur-struktur yang identik, tidak adanya diferensiasi fungsi di dalam kedudukan-kedudukan para pemimpin,

²⁰ “Pengertian dan Teori-teori Klasik Birokrasi”, <http://Repository.ut.ac.id>, diakses pada 4 Desember 2018, pukul 10:45 WIB.

²¹ Sugeng Priyadi, *Sejarah Kota Banyumas (1571 hingga kini)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 77.

²² P.J. Suwarno, *op cit.*, hlm.71.

dan adanya swasembada yang otonom.²³

Kedua, adanya jalur hirarki yang jelas, sesuai dengan birokrasi modern hubungan antara para pejabat itu sebagai atasan dan bawahan.²⁴ Ketiga, pejabat diangkat berdasarkan atas suatu kontrol, kepada perorangan diberikan gaji yang berjenjang sesuai dengan kedudukan dalam hirarki. Struktur hirarki dalam birokrasi Banyumas pasca dibentuk menjadi sebuah Karesidenan diikuti dengan pemberian gaji yang berjenjang dari pemerintah Hindia Belanda.

Selain birokrasi pembentukan Karesidenan Banyumas juga berdampak pada terbukanya wilayah banyumas dari kondisinya yang terisolasi. Pada Tahun 1838 jaringan jalan di Banyumas mulai mengalami peningkatan dan mulai banyak yang bisa dilalui dokar, salah satunya jalan dari Banyumas menuju Banjarnegara sepanjang 39 km. Selain itu, jaringan jalan dari Kalibagor-Sokaraja yang bercabang dua arah masing masingnya juga sudah dapat dilalui dokar. Jaringan jalan tersebut setiap tahunnya mendapat perawatan

yang dibiayai oleh kerja wajib masyarakat (*heeredienten*).²⁵

Selain jalur darat, pemerintahan Hindia Belanda juga mengembangkan pelabuhan Cilacap dengan membangun sebuah terusan yang dikenal dengan nama Kaliyasa. Terusan ini baru berhasil dibangun pada tahun 1836, meski demikian pelabuhan Cilacap sudah mulai berkembang menjadi ramai sejak tahun 1832, ketika pemerintah kolonial menggunakannya untuk mengirim komoditas ekspor, terutama kopi.²⁶

Pembentukan Karesidenan Banyumas juga berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Banyumas, terutama setelah diberlakukannya tanam paksa. Dalam pelaksanaan kebijakan tanam paksa rakyat juga dituntut untuk membayar pajak tanah dan berbagai pungutan lain. seperti pajak keluarga, pajak pemilikan, pajak usaha, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, yang dijadikan ukuran dalam penentuan pembayaran pajak adalah status sosial

²³ Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, (Jakarta : Penerbit Sinar Harapan, 1979), hlm. 29-30.

²⁴ P.J. Suwarno, *op cit.*, hlm.71.

²⁵ Ibnu Fauzan, *Perkembangan Kota Kecil Kalibagor dan Sokaraja, Banyumas Jawa Tengah 1838-1930-an*, *Skripsi*, (Yogyakarta : UGM, 2014), hlm. 58.

²⁶ Pradita Devis Dukarno, *Sejarah Ekonomi Orang Kalang di Cilacap dan Kebumen 1950an-1990an*, *Skripsi*, (Yogyakarta : UGM, 2013), hlm. 25.

dan kemampuan seseorang yang dapat dilihat melalui banyaknya pembantu dalam suatu keluarga, jumlah brayat, jumlah anggota keluarga, dan banyaknya orang yang hidup dibawah perlindungannya.²⁷

Pajak lain yang harus ditanggung oleh masyarakat pedesaan adalah pajak rumah tangga. Di Banyumas pajak ini dikenal dengan pajak *plawang* (pintu) yang dikenakan pada setiap keluarga yang memiliki rumah sendiri.²⁸ Selain membayar pajak dan penyerahan wajib rakyat juga masih dibebani dengan adanya kerja paksa. Pengerahan tenaga kerja paksa ini dilakukan dengan cara-cara tradisional.

Pengerahan tenaga kerja paksa secara tradisional ini pada dasarnya dibebankan kepada petani sikep, yang memegang hak atas tanah pertanian. Kemudian karena kebutuhan akan tenaga kerja paksa yang semakin meningkat pemerintah Hindia Belanda kemudian mengubah sistem kepemilikan tanah yang ada di Masyarakat. Semua tanah merupakan milik desa, sehingga tanah tanah perorangan kemudian dibagi rata sebagai tanah komunal. Termasuk tanah pusaka yang diwarisi dari para pendiri desa juga dibagi rata hak

penggarapannya sehingga kerja paksa dapat dikenakan kepada semua warga.²⁹

Berbagai tuntutan selama tanam paksa kemudian mengakibatkan kemiskinan di kalangan masyarakat pribumi. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kasus-kasus pencurian, perampokan, dan perampasan di daerah Banyumas.³⁰

KESIMPULAN

Sejarah wilayah Banyumas dapat dilihat dari historiografi tradisional berupa babad. Ada tiga babad yang membahas terkait Banyuma yaitu, babad Pasirluhur, babad Wirasaba, dan babad Banyumas. Dalam babad Banyumas, dikisahkan wilayah Kadipaten Wirasaba ketika dibawah kepemimpinan Joko Kaiman dibagi menjadi empat bagian yaitu Banjar Petambakan, Merden, Wirasaba dan Kejawar. Adipati Wargahutama II kemudian membangun pusat pemerintahan baru di hutan Mangli, dan diberi nama Banyumas.

Pasca perang Diponegoro wilayah Banyumas kemudian diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda dan dibentuk menjadi sebuah Karesidenan yang terdiri dari empat

²⁷ Tanto Sukardi, *op cit.*, hlm. 55.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*, hlm. 101-102.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 155.

kabupaten, lima Afdeeling dan 18 Distrik.

Pembentukan Karesidenan Banyumas berdampak pada beberapa hal, yang pertama adanya transformasi birokrasi dari patrimonial menuju rasional. Kedua, perkembangan jalur transportasi di Banyumas dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Arsip koleksi UMP, *Algemeen verslag der residentie banjoemas over 1833 Eerst Afdeeling, Algemeen, Bestuur*, No. B067.

Buku

Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, 2011, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Carey, Peter, 2012, *Kuasa Ramalan Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855*, Jakarta : KPG.

Daliman, A., 2012, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta : Ombak.

Heather Sutherland, 1979, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, Jakarta : Penerbit Sinar Harapan.

M. Warwin R. Sudarmo dan Bambang S. Purwoko, 2009, *Sejarah Banyumas dari Masa ke Masa*, Jakarta : Bupati Banyumas.

Sugeng Priyadi, 2018, *Sejarah Kota Banyumas (1571 hingga kini)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Suwarno, P. J., 2003, *Tatanegara Indonesia dari Sriwijaya sampai Indonesia Modern*, Yogyakarta : Penerbit Universitas Sanata Darma.

Tanto Sukardi, 2014, *Tanam Paksa di Banyumas*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Yustina Hastrini Nurwanti, dkk., 2015, *Sejarah Perkembangan Ekonomi dan Kebudayaan di Banyumas Masa Gandasubrata Tahun 1913-1942*, Yogyakarta : BPNB Yogyakarta

Skripsi dan tesis

Budi Tjahjono, 2015, *Arsitektur Tradisional Jawa Banyumasan Pada Pendopo Duplikat Si Panji di Kota Lama Banyumas*, Tesis, Semarang : UNDIP.

Esa Meiana Palupi, 2017, "Modernisasi Banyumas 1890-1942 : Kajian Perkembangan Sosial-Ekonomi", *Skripsi*, Yogyakarta : UNY.

Ibnu Fauzan, *Perkembangan Kota Kecil Kalibagor dan Sokaraja, Banyumas Jawa Tengah 1838-1930-an*, 2014, *Skripsi*, Yogyakarta : UGM.

Pradita Devis Dukarno, 2013, *Sejarah Ekonomi Orang Kalang di Cilacap*

dan Kebumen 1950an-1990an,
Skripsi, Yogyakarta : UGM.

Purnawan Basundoro, 1999,
“Transportasi dan Ekonomi Di
Karesidenan Banyumas Tahun
1830-1940”, *Tesis*, Yogyakarta :
UGM.

Internet

“Pengertian dan Teori-teori Klasik
Birokrasi”,
<http://Repository.ut.ac.id>,
diakses pada 4 Desember 2018,
pukul 10:45 WIB.



Yogyakarta, 17 Oktober 2019

Pembimbing TAS

Reviewer


Dr. Miftahuddin, M.Hum.
NIP. 19740302 200312 1 006


Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001

